

NO. : 90/S.K./B/III ✓

DJAKARTA , 19 Djanuari 1965

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membatja :

Surat Kepala Inspektorat S. M. P. direktorat Pendidikan Umum tanggal 31 Desember No. PSMP/376/SK/Rhs/64 tentang usul penambahan pembukaan, pemetjahan dan penegerian SMP tahun adjaran 1964/1965.

Menimbang :

- a. bahwa berhubung bertambah banyaknya hasrat para murid yang telah lulus udjian masuk S.L.P. Negeri tahun 1963/1964 untuk melandjutkan peladjaran ke S.M.P., perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri di beberapa tempat;
- b. bahwa S.M.P. Negeri yang telah terlampau besar sehingga penjelenggaraan pengadjarannya tidak dapat berdjalan lantjar, perlu dipetjah mendjadi dua buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.P. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rentjana penjabaran sekolah2 dari Departemen P.D. dan K. sebaiknya di negerikan mendjadi S.M.P.2 Negeri;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selandjutnja;
- e. bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas, perlu menambah pembukaan, pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1964/1965;

Mengingat :

1. Undang2 Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penjelenggaraan sekolah negeri;
3. Undang2 art.4 tahun 1950 jo Undang2 No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di-sekolah2;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512 / Kab. Tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah landjutan serta singkatannja;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Pebruari 1963 No. 13 / 1963 tentang perubahan nama "Sekolah Rakjat 6 tahun" mendjadi "Sekolah Dasar";
6. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/s jo 1959 No.125409/s tentang peraturan umum Udjian Masuk dan Udjian Penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
7. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, selandjutnja disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Memetjah S.M.P. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II keputusan ini mendjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri, baik organisatoris, administrative, maupun dibidang tehnik kependidikan;
- Ketiga : Menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran III keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;
- Keempat : Terhadap pasal2 "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1a. Selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan K. belum dapat menjediakan, maka gedung, halaman sekolah, mebel dan alat2 perlengkapan lainnya didjamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat.

- b. Segala penagihan yang bersifat keperdataan, termasuk perdjandjian hutang piutang yang di buat oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia Sekolah atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 2a. Perumahan guru2 dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat selingga merupakan keringanan bagi guru2 yang bersangkutan.
- b. Sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan2 Pemerintah yang berlaku untuk itu.
3. Kepala Sekolah atau guru2 yang disertai pimpinan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K.
4. Terhadap Sekolah2 yang dinegerikan, chususnja terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid2 dikenakan ketentuan2, tentang pengadjar, pegawai dan murid2 negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi sjarat penjalurannya menjadi tanggung jawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatip dan sekolah yang bersangkutan.
5. Chusus bagi murid2 yang diterima dikelas I hanjalah yang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan Penampungan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk2 Inspeksi Daerah S.M.P. yang bersangkutan.
- 6a. Tiap-tiap kelas terdiri sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanjak-banjaknya 40 orang murid.
- b. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya, harus seizing Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.

Kelima : Djikalau sjarat2 tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan untuk selandjutnja penerimaan murid2 di kelas I.

Keenam : Biaja Penjelenggaraanberhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun2 1965 dan selandjutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan pasal 8 E.3.15. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1964.

Ketujuh : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1965.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum
TTD

(Idris M. P. Hutapea)

Lampiran III Surat Keputusan Menteri P.D. Dan K. tgl. 19-1-1965 No. 90/S.E./B./III.
Tentang : Penegerian S.M.P. Swasta tahun adjaran 1964/1965.

Nomor Urut	Nama dan tempat Sekolah Jang dinegerikan	Djumlah kelas	Keterangan
1.	S.M.P. di Manggeng, Ketjamatan Manggeng, Kabupaten Atjeh Selatan, Daerah Tingkat I Atjeh.	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Manggeng. b. Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Swasta Manggeng
2.	S.M.P. di Tjalang, Kawedanan Tja-Lang, Kabupaten Atjeh Barat, Daerah Tingkat I Atjeh	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tjalang. b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Kawe-Danan Tjalang.
3.	S.M.P. J.P.N. di Meukek, Ketjamatan Meukek, Kabupaten Atjeh Selatan, Daerah Tingkat I Atjeh.	2 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Meukek; b. Diambil alih dari jajasan Pembangunan Meukek.
4.	S.M.P. di Sipupus-Siunggam, Ketjamatan Padang Bolak, Kabupa-Ten Tapanuli Selatan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Sipupus-Siunggam b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Per-Siapan Negeri Sipupus-Siunggam
5.	S.M.P. Sinar Persatuan Tanotombangan di Hutaradja, Ketjamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri Di Hutaradja b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Swasta Tanotombangan.
6.	S.M.P. "Sepakat" di Sipiongot Ketjamatan Dolok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Sipiongot b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Swasta Sipiongot.
7.	S.M.P. Ambulan di Tigarungu Ketjamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tigarungu b. Diambil alih dari Panitia S.M.P. Swasta Ambulan Tigarungu.
8.	S.M.P. Berbantuan di Hutabajuradja, Ketjamatan Tanah Djawa, Kabupaten Simalungun, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	8 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Hutabajuradja. b. Diambil alih dari Panitia S.M.P. Jajasan Berbantuan Hutabajuradja.
9.	S.M.P. di Bunturadja, Ketjamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Daerah	5 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Bunturadja.

Lampiran III Surat Keputusan Menteri P.D. Dan K. tgl. 19-1-1965 No. 90/S.E./B./III.
Tentang : Penegerian S.M.P. Swasta tahun adjaran 1964/1965.

Nomor Urut	Nama dan tempat Sekolah yang dinegerikan	Djumlah kelas	Keterangan
1.	S.M.P. di Manggeng, Ketjamatan Manggeng, Kabupaten Atjeh Selatan, Daerah Tingkat I Atjeh.	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Manggeng. b. Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Swasta Manggeng
2.	S.M.P. di Tjalang, Kawedanan Tjalang, Kabupaten Atjeh Barat, Daerah Tingkat I Atjeh	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tjalang. b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Kawedanan Tjalang.
3.	S.M.P. J.P.N. di Meukek, Ketjamatan Meukek, Kabupaten Atjeh Selatan, Daerah Tingkat I Atjeh.	2 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Meukek; b. Diambil alih dari jajasan Pembangunan Meukek.
4.	S.M.P. di Sipupus-Siunggam, Ketjamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Sipupus-Siunggam b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Per-Siapan Negeri Sipupus-Siunggam
5.	S.M.P. Sinar Persatuan Tanotombangan di Hutaradja, Ketjamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri Di Hutaradja b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Swasta Tanotombangan.
6.	S.M.P. "Sepakat" di Sipiongot Ketjamatan Dolok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Sipiongot b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Swasta Sipiongot.
7.	S.M.P. Ambulan di Tigarungu Ketjamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tigarungu b. Diambil alih dari Panitia S.M.P. Swasta Ambulan Tigarungu.
8.	S.M.P. Berbantuan di Hutabajuradja, Ketjamatan Tanah Djawa, Kabupaten Simalungun, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	8 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Hutabajuradja. b. Diambil alih dari Panitia S.M.P. Jajasan Berbantuan Hutabajuradja.
9.	S.M.P. di Bunturadja, Ketjamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	5 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Bunturadja. b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Swasta

			Bunturadja.
10.	S.M.P. Kenangan di Tembung, Ketjamatan Pertjut, Kabupaten Deli Serdang, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tembung. b. Diambil alih dari Panitia Pe- Njelenggara S.M.P. Kena- Ngan Tembung.
11.	S.M.P. Persiapan Negeri di Onan Gandjang, Ketjamatan Onan Gand- Jang Kabupaten Tapanuli Utara, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Onan Gandjang b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Persia- Pan Onan Gandjang.
12.	S.M.P. di Parongil, Ketjamatan Silima Pungga2, Kabupaten Dairi, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	6 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Payongil.
13.	S.M.P. Bajang di kota Berapak, Ketjamatan Bajang, Kabupaten Pesi- Sir Selatan, Daerah Tingkat I Sumatera Barat	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kota Berapak. b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Bajang Di kota Berapak.
14.	S.M.P. di Kidjang, Ketjamatan Bin- Tan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau.	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kidjang. b. Diambil alih dari Jajasan Ke- Sedjahteraan Perbaki.
15.	S.M.P. Pantjawardhana di Belakang Padang, Ketjamatan Batam, Kabupa- Ten Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau.	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Belakang Padang. b. Diambil alih dari Jajasan Pembangunan.
16.	S.M.P. Nasional di Tandjung Uban, Ketjamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau.	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tandjung Uban. b. Diambil alih dari Jajasan Pendidikan Nasional di Tand- Jung Uban.
17.	S.M.P. Bantuan di Udjung Batu, Ketjamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau.	2 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Udjung Batu. b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Udjung Batu.
18.	S.M.P. Jajasan di Delanggu, Ketja- Matan Delanggu, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa Tengah	12 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Delanggu. b. Diambil alih dari Panitia Pen Diri S.L. Klaten.
19.	S.M.P. di Kemalang, Ketjamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa Tengah	7 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kemalang. b. Diambil alih dari Panitia Pen Diri S.L. Klaten.
20.	S.M.P. di Karangdowo, Ketjamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa Tengah.	5 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Karangdowo. b. Diambil alih dari Panitia Pen diri S.L. Klaten

21.	S.M.P. di Djogonalan, Ketjamatan Djogonalan, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa Tengah.	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Djogonalan. b. Diambil alih dari Panitia Perdiri S.L. Klaten.
22.	S.M.P. Persiapan Negeri di Lorok, Kawedanan Lorok, Kabupaten Patjitan, Daerah Tingkat I Djawa Timur.	2 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Lorok. b. Diambil alih dari Panitia Pendiri Sekolah Landjutan Negeri di Patjitan.
23.	S.M.P. Nasional di Kerambitan, Ketjamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Daerah Tingkat I Bali.	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kerambitan. b. Diambil alih dari Panitia Pendiri Sekolah Landjutan Negeri di Patjitan.
24.	S.M.P. di Kompo, Ketjamatan Kompo, Kabupaten Dompu, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	2 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kompo. b. Diambil alih dari Panitia Pembangunan Gedung S.M.P. Negeri Kompo.

Nomor Urut	Nama dan Tempat Sekolah Jang dipetjah	Dipetjah mendjadi	Djumlah Kelas	Keterangan
25	S.M.P. Negeri V di Malang, Kotapradja Malang, Daerah Tingkat I Djawa Timur.	a. S.M.P. Negeri V di Malang. b. S.M.P. Negeri di Singosari, Ketjamatan Singosari, Kabupaten Malang, Daerah Tingkat I Djawa Timur.	6 buah	Diselenggarakan Pada pagi hari.
26	S.M.P. Negeri V di Palembang, Kotapradja Palembang, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	a. S.M.P. Negeri VI Di Palembang, Sumatera Selatan b. S.M.P. Negeri IX Di Palembang, Kotapradja Palembang, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan	8 buah	Diselenggarakan Pada sore hari.
27	S.M.P. Negeri di Denpasar, Ketjamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Daerah Tingkat I Bali.	a. S.M.P. Negeri I di Denpasar, Ketjamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Daerah tingkat I Bali. b. S.M.P. Negeri II Di Denpasar, Ketjamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Daerah Tingkat I Bali	7 buah	Diselenggarakan Pada pagi hari.

28.	S.M.P. Negeri I di Tondano Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	a. S.M.P Negeri I Di Tondano, Kabu upaten Minahasa, Sulawesi Utara.	8 buah	Diselenggarakan Pada pagi hari.
		b. S.M.P Negeri di Tataarar, Kabupa uten Minahasa, Da erah Tingkat I Sulawesi Utara.		
29.	S.M.P. Negeri di Airmadidi, Kecamatan Airmadidi, Kabupa- uten Minahasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	a. S.M.P. Negeri di Airmadidi, Kabupa uten Minahasa Sulawesi Utara.		
		b. S.M.P. Negeri di Tatelu, Kecamatan Tatelu, Kabupaten Minahasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	8 buah	Diselenggarakan Pada pagi hari.
30.	S.M.P. Negeri di Amurang, Kawedanan Amurang, Kabupa- uten Minahasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	a. S.M.P. Negeri di Amurang, Kabupa- uten Minahasa, Sulawesi Utara.		
		b. S.M.P. Negeri di Tengah, Ketjama- tan Tengah, Kabu upaten Minahasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.		
		c. S.M.P. Negeri di Tumpan, Ketjama tan Tumpan, Kabupaten Minaha- sa, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	7 buah	Diselenggarakan Pada pagi hari
			7 buah	Diselenggarakan Pada pagi hari
31.	S.M.P. Pers Negeri Wonosari		4 buah	S.M.P. N 1 Wonosari.

Kepala Sekolah
S.M.P. Negeri I
Wonosari
Dr. H. Winasis, S.Pd
NIP. 130796248

Wonosari, 11 Juli 2005
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
TID

(Idris M.T. Hutapea)